BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokrasi (*demokratische rechstaat*) dan sekaligus adalah Negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisah satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.¹

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa dimana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai otoritarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidak pastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat Negara bidang pertahanan dan keamanan, serta

¹ Zulkarnian Ridlwan, 2012, *Negara hukum Indonesia kebalikan Nachterstaat* volume 5, nomor 2, hlm 143

tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mangayomi masyarakat.²

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-statet*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalagunaan narkotika ini bukan saja merupakan perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkoba adalah akronim atau kepanjangan Narkoba dan obatan Berbahaya. Sementara Narkotik adalah menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk dan merangsang opium ganja.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang

² Munsharif Abdul Chalim, 2015, Faisal Farhan, *Peranan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di tinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia*, volume II, nomor 1, halaman 103

³ Wenda Hartanto, 2017, *penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika dan Obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas Internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan Negara*, Volume 14, Nomor 1, Halaman 1-2.

ini. Penyalagunaan Narkotika merupakan ancaman, serta meresahkan bagi kehidupan dan penggunaannya, keluarganya, dan bahkan negara. pengurang atau penghilang nyeri, karena sifatnya yang berkaitan dengan reseptor opioid yang ada di tubuh.⁴

Hukum militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Kemanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Hukum militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya. Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalagunakan narkotika, dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendah dan tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan

⁴ E. Indra Yani, Aji Titin Roswitha Nursanthy, 2021, *Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak berwajib (Kepolisian maupun Anggota Militer)*, volume V, nomor 2, Halaman 179

militer sebagai mana diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.⁵

⁵ Ahmad Ridha, Sufirman Rahman dan Nasrullah Arsyad, 2022, "*Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI*" Volume 3, Nomor 8, Halaman 1295-1296

Judul **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN
NARKOTIKA GOLONGAN I OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA”**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	130-K/PM III 16/AD/VII /2012	Tugu Agung	Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	<p>a. Pidana pokok: Penjara selama 2 (dua) tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer</p> <p>b. Menetapkan barang bukti berupa: Surat-surat</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis ganja milik Pratu Tugu Agung dan Dompot Warna coklat milik Sdri. Intang</p> <p>b. Satu eksemplar Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1222/KNF/XI/2011 tanggal 4 November 2011 atas nama Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 Yang ditandatangani oleh Pemerika AKBP Dra. Sugiharti NRP.</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Tugu Agung, Pratu NRP. 31081811101088 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”</p> <p>2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun</p> <p>Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)</p>	Inkracht

				<p>63121057, AKP Faizal Rachmad, ST NRP. 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S, Si NRP. 85011704.</p> <p>c. Satu surat Perintah Penyitaan barang bukti tiga buah linting kertas kecil ganja kering dan satu buah dompet warna coklat dari Kapolsekta Tamalarea Nomor: A.8/331/X/2011/Reskrim tanggal 22 Oktober 2011.</p> <p>d. Satu lembar Berita Acara Penyitaan dari Iptu Ahmad Rosman, SH NRP. 70050533</p> <p>Barang-barang :</p> <p>a. Satu buah tas warna coklat dikembalikan kepada Sdri. Inting.</p> <p>b. Tiga linting ganja dirampas untuk dimusnakan.</p> <p>Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>subsidaair selama 3 bulan kurungan pengganti</p> <p>3. Menetapkan barang-barang bukti berupa: Barang-barang:</p> <p>a. 1 (satu) buah Dompet warna coklat dikembalikan kepada saksi-1.</p> <p>b. 3 (tiga) linting ganja dirampas oleh negara untuk dimusnakan</p> <p>Surat-surat :</p> <p>a. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis ganja milik Pratu Tugu Agung dan Dompet warna coklat milik Sdri. Inting.</p> <p>b. 1 (satu) Satu eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 1222/KNF/XI/2011 tanggal 4 November 2011 atas nama Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 Yang ditandatangani oleh Pemerika AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST NRP. 77091083 dan Ipda</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Arianata Vira T, S, Si NRP. 85011704.</p> <p>c. 1 (satu) Satu lembar surat Perintah Penyitaan barang bukti tiga buah linting kertas kecil ganja kering dan satu buah dompet warna coklat dari Kapolsekta Tamalarea Nomor: A.8/331/X/2011/Reskrim tanggal 22 Oktober 2011.</p> <p>d. 1 (satu) Satu Lembar Berita Acara Penyitaan dari Iptu Ahmad Rosman, SH NRP. 70050533</p> <p>Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
2.	70-K/PMT. III/BDG/AD /X/2012	Tugu Agung	Pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	<p>Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer III-6 Makasar Menyatakan sebagai berikut</p> <p>a. Terdakwa Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 terbukti bersalah melakukan tindak pidana, <i>“Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dan dalam bentuk tanaman”</i></p>	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Eman Jaya SH Mayor Sus NRP 524422 2. menguatkan Putusan Peradilan Militer III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, untuk seluruhnya. 3. Membebaskan biaya perkara 	Inkracht

			<p>Kedua Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<p>Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Tedakwa dijatuhi Pidana:</p> <p>Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun. Dikurangi selama Tedakwa berada dalam penahanan sementara.</p> <p>Pidana Denda : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 6 bulan kurungan.</p> <p>Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer</p> <p>b. Menetapkan barang bukti berupa: Berupa surat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satu lembar foto barang bukti Narkotika jenis ganja milik Pratu Tugu Agung dan Dompot warna coklat milik Sdri. Inting. - Satu eksemplar Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1222/KNF/XI/2011 tanggal 4 November 2011 atas nama Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 Yang 	<p>tingkat banding kepada Tedakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).</p> <p>Memerintahkan kepada Pitera agar mengirim salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makasar.</p>	
--	--	--	---	--	---	--

				<p>ditandatangani oleh Pemerika AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST NRP. 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S, Si NRP. 85011704.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satu surat Perintah Penyitaan barang bukti tiga buah linting kertas kecil ganja kering dan satu buah dompet warna coklat dari Kapolsekta Tamalarea Nomor: A.8/331/X/2011/Reskrim tanggal 22 Oktober 2011. - Satu lembar Berita Acara Penyitaan dari Iptu Ahmad Rosma, SH NRP. 700505333 tanggal 23 Oktober 2011. <p>Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.</p> <p>Berupa barang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satu buah tas warna coklat, dikembalikan kepada Sdri. Inting - Tiga linting ganja, dirampas untuk dimusnahkan. <p>Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p> <p>Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.</p>	
--	--	--	--	--	--

3.	06 K/MIL/ 2013	Tugu Agung			<p>MENGADILI</p> <p>Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi:</p> <p>Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makasar tersebut;</p> <p>Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinngi III Surabaya Nomor : 70-K/PMT.III/BDG/AD/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar Nomor : 130-K/PM III-16/ADVII/2012 tanggal 29 Agustus 2012;</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TUGU AGUNG, Pratu NRP. 31081811101088 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk</p>	Inkracht
----	-------------------	------------	--	--	---	----------

					<p>Tanaman”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok: Penjara selama 4 (empat) tahun; Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Pidana Denda: sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta ribu rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan pengganti; Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;</p> <p>3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>4. Menetapkan barang-barang bukti berupa: Barang-barang:</p> <p>a. 1 (satu) buah Dompot warna coklat dikembalikan kepada Saksi-1.</p> <p>b. 3 (tiga) linting ganja dirampas oleh negara untuk dimusnakan.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Surat-surat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis ganja milik Pratu Tugu Agung dan Dompot warna coklat milik Sdri. Inting. b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1222/KNF/XI/2011 Tanggal 4 November 2011 atas nama Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachman, ST. NRP. 77091083 Dan Ipda Arianata Vira T, S.Si. NRP. 85011704. c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan Barang bukti tiga buah linting kertas kecil ganja kering dan satu buah Dompot warna coklat dari Kapolsekta Tamalanrea Nomor: A.8/331/X/2011/ Reskrim tanggal 22 Oktober 2011. d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Iptu Ahmad Rosman, S.H. NRP. 70050533 tanggal 23 Oktober 2011. 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
4.	11 PK/MIL /2017	Tugu Agung			<p>MENGADILI</p> <p>Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: TUGU AGUNG, Pratu NRP. 31081811101088 tersebut.</p>	Inkracht
5.	202-K/PM.I -01/AD/XI/ 2016	Riza Winarsa	a. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<p>1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:</p> <p>a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan</p>	<p>MEGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaiyu Reza Winarsa, Kapten CPM, NRP 21940067280473 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :</p>	Inkracht

				<p>Narkotika Golongan I” sebagaimana ditaur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana pokok: pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan. - Pidana tambahan: Dipecat dari Dinnaas Militer Cq. TNI AD. <p>c. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>1) Barang-barang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) buah alat tes Multi Drug Screen Test Monotest. b) 2 (dua) buah alat test Urine Merk V Care. 	<p>“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan 3. Memulihkan segala Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Barang: <ol style="list-style-type: none"> 1) 2 (dua) buah alat tes Multi Drug Screen Test Monotest. 2) 2 (dua) buah alat tes urine merk V Care. <p>Dimusnahkan.</p> <p>b. Surat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2 (dua) lembar foto alat tes urine merk Multi Drug Screen Monotest. 2) 5 (lima) lembar surat hasil tes urine BNNK Lhokseummawe Nmor B/106/V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNK-LSW tanggal 3 mei 2016 yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>(Dirampas untuk dimusnahkan)</p> <p>2) Surat-surat:</p> <p>a) 2 (dua) buah lembar foto alat test urine merk Multi Screen Test Monotest.</p> <p>b) 5 (lima) buah Surat hasil test urine BNNK Lhokseumawe Nomor B / 106 / V / Ka / Pcm.00.02 / 2016 BNNK -LSW tanggal 3 mei 2016.</p> <p>c) 1 (satu) lembar hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh Nomor 4.455 / 227 / BLK / V / 2016 tanggal 3 mei 2016</p> <p>(Tetap diletakkan dalam berkas perkara)</p> <p>d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).</p>	<p>Methamphetamine (MET)</p> <p>5. Membebankan biaya perkara kepada Negara</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>2. Nota Pembelaan (<i>Pleidooi</i>) yang dijukan secara tertulis oleh Penasehan Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:</p> <p>Tentang keberatan terhadap pembutian unsur.</p> <p>a. Tentang unsur kedua: “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Bahwa untuk terpenuhinya unsur melawan hukum haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara sah sesuai hukum yang berlaku. Bahwa unsur dengan melawan hukum tidak terbukti secara sah</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dan meyakinkan karena pada diri terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (schuld) dalam perbuatan yang telah dilakukannya baik yang dilakukan dengan kesengajaan, hal tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk memakai Narkotika tersebut.</p> <p>b. Tentang unsur ketiga: “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”</p> <p>Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hanya satu alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan Narkotika</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Golongan I untuk diri sendiri yaitu TESTER dan surat-surat keterangan dari BNNK Lhokseumawe serta UPTD Lab Banda Aceh.</p> <p>Tidak ada alat bukti lain yang dapat menjelaskan dan menegaskan terpenuhinya unsur ini dilakukan oleh Terdakwa.</p> <p>Keterangan saksi-saksi yang diajukan Oditur Militer I-01 Banda Aceh dipersidangan sama sekali tidak dapat membuktikannya dengan barang bukti dimana hanya hasil tester saja.</p> <p>Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer melanggar Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima Pembelaan (<i>Pleidooi</i>) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan. b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. c. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer (<i>vrijspraak</i>) sesuai dengan 	
--	--	--	--	---	--

				<p>Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (<i>onstslag van alle rechtsvervolging</i>) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP</p> <p>d. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan mertabatnya semula.</p> <p>e. Membebaskan biaya perkara kepada Neraga.</p> <p>3. <i>Repliek</i> yang disampaikan secara lisan oleh Oditur Militer di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutanannya semula.</p> <p>4. <i>Duplik</i> yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan tetap pada <i>Pleidooi</i> atau Nota Pembelaan semula.</p>		
6.	179 K/MIL/2017	Riza Winarsa	1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009	<p>Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;</p>	<p>MEGADILI</p> <p>Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:</p>	Inkracht

			<p>tentang Narkotika.</p> <p>2. Pasal 10 KUHP</p> <p>3. Pasal 26 KUHPM</p>	<p>Tidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD;</p> <p>Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>1. Barang-barang:</p> <p>a. 2 (dua) buah alat tes <i>Multi Drug Screen Monotest</i>;</p> <p>b. 2 (dua) buah alat tes <i>urine</i> merek V Care;</p> <p>(Mohon dirampas untuk dimusnahkan)</p> <p>2. Surat-surat:</p> <p>a. 2 (dua) lembar foto alat tes <i>urine</i> merek <i>Multi Drug Screen test Monotest</i>;</p> <p>b. 5 (lima) lembar Surat hasil <i>test urine</i> dari BNNK Lhokseumawe Nomor B/106/V/Ka/Pcm.00.02/2016/BNNK-LSW tanggal 3 mei 2016;</p> <p>c. 1 (satu) lembar hasil tes Urine dari UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3 mei 2016;</p>	<p>Oditur Militer pada Oditur Militer I-01nBanda Aceh tersebut;</p> <p>Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 202-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 21 Februari 2017;</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu RIZA WINARSA, Kapten Cpm NRP. 21940067280473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>(tetap diletakkan dalam berkas perkara)</p> <p>Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);</p>	<p>Pidana pokok: Pidana penjara 1 (satu) tahun;</p> <p>Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti:</p> <p>a. Barang:</p> <p>1) 2 (dua) buah alat tes <i>Multi Drug Screen Monotest</i>;</p> <p>2) 2 (dua) buah alat tes <i>urine</i> merek V Care Dimusnahkan</p> <p>b. Surat-surat:</p> <p>1) 2 (dua) buah lembar foto tes <i>urine</i> merek <i>Multi Drug Screen Monotest</i>;</p> <p>2) 5 (lima) lembar Surat hasil tes <i>urine</i> BNNK Lhokseumawe Nomor</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>B/106/V/Ka/Pcm.00.02/B NNK-LSW tanggal 3 mei 2016 yang menerangkan <i>urine</i> Terdakwa positif mengandung zat <i>Amphetamine</i> (AMP) dan <i>Methamphetamine</i> (MET);</p> <p>Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;</p> <p>Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar RP. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
7.	17 PK/MIL/ 2019	Riza Winarsa			<p>MEGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana RIZA WINARSA, Kapten Cpm NRP. 21940067280473 tersebut; - Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 179 	Inkracht

					<p>K/MIL/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tersebut</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terpidana Kapten RIZA WINARSA NRP. 21940067280473 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer; 2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan tersebut; 3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Barang-barang: <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (dua) buah alat tes <i>Multi Drug Screen Monotest</i>; 2. 2 (dua) buah alat tes <i>urine</i> merek V Care; b. Surat-surat: <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (dua) lembar foto alat tes <i>urine</i> merek <i>Multi Drug</i>
--	--	--	--	--	---

					<p><i>Screen Monotest</i>;</p> <p>2. 5 (lima) lembar Surat hasil tes <i>urine</i> BNNK Lhokseumawe Nomor B/106/V/Ka/Pcm.00.02/BN NK-LSW tanggal 3 mei 2016 yang menerangkan <i>urine</i> Terdakwa positif mengandung zat <i>Amphetamine</i> (AMP) dan <i>Methamphetamine</i> (MET);</p> <p>3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Banda Aceh Nomor 4.455/227/BLK/V/2016 tanggal 3 mei 2016 yang menerangkan <i>urine</i> Terdakwa positif mengandung zat <i>Amphetamine</i> (AMP) dan <i>methamphetamine</i> (MET);</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Negara.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber data dari, Direktori MA 2022

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia?
2. Mengapa terhadap Terdakwa/pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I hakim pengadilan Militer dan pengadilan Militer Tinggi memutuskan 1 tahun penjara, sedangkan hakim tingkat kasasi memutuskan 4 tahun penjara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penyebab Pengadilan Militer dan pengadilan Militer Tinggi memutuskan 1 Tahun penjara sedangkan pada tingkat kasasi memutuskan 4 Tahun penjara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan untuk bisa dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum dan berharap bisa menjadi referensi atau pedoman bagi mahasiswa serta dosen bahkan untuk menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya dalampenyalahgunaan Narkotika oleh oknum Tentara Nasional Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum Narkotika
- 2) Dengan hasil penelitian ini bisa dapat memberikan pokok pemikiran bagiorang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum dan dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran

pustaka yang dilakukan Penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka, penulis ditemukan Skripsi yang berkaitan dengan sengeкта transaksi perdagangan Kontrak berjangka komoditi sebagai berikut:

- a. Nama : Ardan Udika Oktava
Nim : 0071010022
Fakultas : Hukum
Universitas : Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Judul : Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI
(Study Kasus No. 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012)
Rumusan masalah : 1. Bagaimana kewenangan pengadilan militer dalam menyidangkan perkara penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Militer dalam proses Penjatuhan Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi anggota TNI?
- b. Nama : Bagas Wirayuda
Nim : 02011181520074
Fakultas : Hukum
Universitas : Sriwijaya Inderalaya

Judul : Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oknum Anggota TNI

Rumusan masalah : 1. Faktor-faktor apa saja yang membuat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimana proses penegakan hukum perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Oknum anggota TNI

c. Nama : Muhammad Caesar
Nim : 11140450000095
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Judul : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/MIL/2016

Rumusan masalah : 1. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer?
2. Bagaimana hakim memutuskan dalam sanksi pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan 69 K/MIL/2016

d. Nama : Dwiadi Permana Syaputra
Nim : 502011349
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Palembang

- Judul : Sanksi pidana dan upaya penyalahgunaan narkotika terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Di Kodam II Sriwijaya
- Rumusan masalah : 1. Apakah sanksi pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana narkotika?
2. Apakah penyalahgunaan narkotika terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat (TNI-AD) di KODAM II SRIWIJAYA?
- e. Nama : Garya A. Bakri
Nim : 1506200342
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul : Analisis Putusan Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika
(Study Putusan 9 K/Mil.2018)
- Rumusan masalah : 1. Bagaimana ketentuan hukum pengguna narkotika bagi Anggota TNI?
2. Bagaimana penanggungjaban pidana bagi anggota TNI yang menggunakan narkotika?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Nomor9 K/Mil.2018?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

keadaan atau gejala-gejala lainnya yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Sifat dalam deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor penyebab, Terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Hakim Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi memutuskan 1 Tahun penjara sedangkan Hakim Tingkat kasasi memutuskan 4 tahun penjara.

b. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apayang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar perilaku manusia yang dianggap pantas.

Berhubungan dengan penelitian ini dimaksud untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan analisis hukum terhadap anggota TNI pengguna narkoba, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan bahan hukum data sekunder lainnya.

2. Variable Penelitian

Adapun variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Variable Bebas

Variable bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable terikat. Variable bebas maksudnya adalah dalam mempengaruhi variable lain. Dengan demikian variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Faktor penyebab, terjadinya Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Hakim PM dan PMT memutuskan 1 tahun penjara sedangkan hakim ditingkat kasasi memutuskan 4 tahun penjara

b. Variable Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim pengadilan militer dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang

berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu²⁸ :

a. Bahan hukum primer

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoriter dan sifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri atas (a) norma atau kaidah dasar, (b) pengaturan dasar, (c) peraturan perundang-undangan, (d) bahan hukum yang tidak dikodifikasi (seperti hukum adat), (e) yurisprudensi (putusan hakim), (f) traktat, dan (g) bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah:

1) Peraturan Perundang-undangan

a. KUPH Militer

b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2) Putusan Hakim

a. Putusan Nomor 130-K/PM III 16/AD/VII /2012

b. Putusan Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AD/X/2012

c. Putusan Nomor 06 K/MIL/2013

d. Putusan Nomor 11 PK/MIL/2017

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji "*penelitian hukum normatif*" hal. 12

- e. Putusan Nomor 202 K/PM.I-01/AD/XI/2016
 - f. Putusan Nomor 179 K/MIL/2017
 - g. Putusan Nomor 17 PK/MIL/2019
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah Kamus, ensiklopedia, indeks komulatif. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan penulis ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk

menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, desertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil terkumpul, maka penulis akan melakukan proses *editing* dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (*coding*). Analisis data ini menggunakan metode analisis Deskriptif kualitatif.

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatu-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan di oleh dengan dengan cara deskriptif komulatif untuk menjawab permasalahan diteliti tersebut.